

ANALISIS DAN USULAN PERBAIKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET BERGERAK DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU

K. Heru Kristianto¹, P. Mudjihartono², Benyamin.L. Sinaga³

¹Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

²Program Studi Magister Teknik Informatika, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

³Program Studi Magister Teknik Informatika, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

E-mail : ¹heruchriz@yahoo.com, ²paulusmudjihartono@gmail.com, ³blsinaga@yahoo.com

Abstrak

Dalam rangka peningkatan kinerja, pemerintah daerah Kabupaten Sanggau berusaha mengoptimalkan pendayagunaan teknologi informasi. Optimalisasi teknologi informasi dilakukan dengan mengembangkan sistem informasi manajemen yang ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, meningkatkan kinerja, merumuskan kebijakan, dan pengambilan keputusan bagi pejabat publik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien. Tujuan dan sasaran strategi ini adalah untuk mempercepat proses arus komunikasi dan distribusi informasi aset bergerak secara terintegrasi di lingkungan satuan kerja pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka diperlukan korelasi positif dari berbagai satuan kerja pemerintah daerah dengan keberhasilan dalam mencapai tahap pengembangan suatu kabupaten.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dilakukan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan hambatan yang dimiliki, analisis RCA untuk mengidentifikasi potensi penyebab terjadinya masalah, analisis FFA merupakan salah satu alat analisis yang digunakan untuk menganalisis secara sistematis faktor-faktor yang ditemukan dalam masalah yang kompleks, analisis QSPM untuk memilih strategi yang tepat, dan menggambarkan DFD untuk menunjukkan usulan sistem informasi pembelian dan penghapusan aset.

Hasil dari analisis system ini akan memberikan usulan perubahan sistem informasi manajemen guna mempercepat proses birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Sanggau. Sistem informasi manajemen merupakan salah satu solusi memperbaiki birokrasi untuk mencapai good governance.

Kata kunci : DFD, FFA, RCA, SWOT, QSPM.

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini *good governance* merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Masyarakat menuntut kepada pemerintah untuk mewujudkan dan melaksanakan *good governance*. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan harus ditinggalkan diganti dengan pola-pola baru penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* melalui peraturan-peraturan dan pembaharuan birokrasi. Birokrasi merupakan organ pemerintah yang memikul tanggung jawab yang dibebankan kepadanya (Dwiyanto Indiahono, 2009) Sejarah birokrasi pemerintahan Indonesia menunjukkan kedudukan birokrasi terhadap kekuatan politik tidak lagi bisa dikatakan netral (Ida Hayu Dwimawanti, 2009)

Perkembangan teknologi informatika disertai dengan teknologi komputer yang canggih dalam waktu yang relatif singkat telah mencapai perkembangannya sampai di setiap bidang kerja dan di setiap lapisan masyarakat (Nataniel Dengan dan Heliza Rahmania Hatta, 2009). Birokrasi, sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan, dituntut untuk profesional dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik sehingga dapat menunjukkan postur ideal yang diharapkan publik (Gde Wisura, 2008). Sesuatu hal yang perlu disadari bahwa pengembangan sistem pelayanan terkait erat dengan kecenderungan terbentuknya masyarakat informasi didunia (Lili Romli, 2008). Etika Pegawai Negeri telah lama diarahkan menjadi standar nasional. Etika ini mengatur perilaku aparat negara sangat berpengaruh pada kualitas kerja dan pelayanan (Badrus Sholeh, 2008). Kunci pembenahan birokrasi Indonesia di masa depan adalah mendekatkannya dengan aset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta sarana pendukung adalah kekuatan di masa depan (Syafuan Rozi, 2009).

Secara bertahap pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menuju terbentuknya masyarakat informasi (Lili Romli, 2008). Untuk mencapai setiap tahapan yang ditentukan, diperlukan kesiapan yang meliputi kesiapan dari sisi pemerintah maupun kesiapan dari sisi masyarakat pengguna, baik individu maupun dari kalangan bisnis (Rosfiah Arsal, 2009). Kesiapan Pemerintah perlu diukur mengingat bahwa pemerintah merupakan pasar utama dari pelayanan publik (Badrus Sholeh, 2008). Kualitas kinerja sumber daya aparatur

baik secara perorangan maupun institusional dapat ditingkatkan jika masalah didekati melalui *system thinking* dan penerapannya dijalankan melalui *knowledge management*. (M.R. Khairul Muluk, 2009).

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) merupakan salah satu instansi yang berada di dalam struktur organisasi Kabupaten. Pengelolaan inventaris aset di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah khususnya di kabupaten Sanggau dilakukan secara manual. Dinas-dinas melaporkan aset-aset yang dimiliki dalam bentuk kertas laporan bulanan. Untuk membantu dan mempermudah tugasnya maka DPPKAD perlu mengimplementasikan teknologi informasi. Salah satu metode analisis yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan implementasi teknologi informasi adalah analisis SWOT.

Analisis SWOT merupakan salah satu metode analisis dalam manajemen strategis yang berguna untuk mengidentifikasi kompetensi suatu organisasi dan mengidentifikasi peluang yang tersedia. Rangkuti (2008) menyebutkan bahwa analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi yang selalu berkaitan dengan visi, misi, rencana strategis dan keputusan organisasi. Analisis SWOT ini didukung *root cause analysis* (RCA) untuk mencari akar masalah. Rooney & Vanden (2004) menyatakan bahwa *Root cause analysis* mencakup proses menentukan apa, bagaimana, dan mengapa sesuatu terjadi. RCA bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab dari suatu permasalahan, mengembangkan dan mengimplementasikan rekomendasi yang digunakan untuk mencegah permasalahan terjadi lagi

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kualitas pelayanan terhadap konsumen dapat dikuantifikasi dengan 22 item dalam instrumen servqual. Instrumen servqual tersebut terdiri dari lima dimensi yaitu, *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *empathy*. *Tangible* meliputi fasilitas fisik, peralatan dan personel yang ada (Parasuraman dkk, 1988). Dengan mengimplementasikan teknologi informasi, maka proses yang dilakukan dalam pembuatan suatu keputusan maupun pelayanan kepada pengguna tidak salah. Kesalahan yang terjadi dalam implementasi teknologi dapat berakibat fatal karena keputusan yang diambil salah. Oleh karena itu, implementasi teknologi informasi di pemerintahan perlu memperhatikan *assurance*, *reliability*, *responsiveness*, dan *tangible*, disamping kualitas sistem (Rainer, R. K. Jr., dan Watson, H. J, 1995), dan kualitas informasi (Munro, M. C., dan Wheeler, B. R., (1981).

Strengths Opportunities Weaknesses Threats (SWOT)

Analisis SWOT adalah indentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencana strategi (*strategic planner*) harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada pada saat ini (Rangkuti (2008). Hal ini disebut dengan Analisis Situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah Analisis SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya.

Root Cause Analysis (RCA)

Model ini juga dapat dipakai oleh pelaku strategis pemerintahan di tiga wilayah yaitu pertama, pengamatan lingkungan eksternal. Pengamatan lingkungan mensyaratkan identifikasi isu kunci dan tren, analisis dan interpretasi pentingnya strategis, menciptakan produk bermanfaat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Bagi pelaku strategis pemerintahan, pengamatan kecenderungan lingkungan ini bermanfaat dalam pembuatan kebijakan, perencanaan anggaran, dan pengembangan sistem manajemen. Kedua, analisis politik. Jenis penilaian strategis ini membantu pelaku pemerintahan untuk menetapkan tidak hanya sifat tren politik tetapi juga untuk menilai kekuatan dan relevansi dari kecenderungan ini. Sebagai pelaksana perumusan dan implementasi kebijakan, Root Cause Analysis ini akan menginformasikan waktu, bentuk, dan isi dari pilihan kebijakan pemerintah. Ketiga, perumusan dan implementasi kebijakan. Dengan menggunakan model ini, pelaku strategis pemerintahan dapat lebih mudah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan (Pflaum, A. dan Delmont, T. 1987).

Force Field Analysis (FFA)

Force Field Analysis (FFA) merupakan salah satu alat analisis yang digunakan untuk menganalisis secara sistematis faktor-faktor yang ditemukan dalam masalah yang kompleks. Faktor-faktor tersebut dapat berupa manusia, sumber daya, sikap, tradisi, peraturan, nilai, kebutuhan dan sebagainya. FFA banyak digunakan untuk merencanakan perubahan. Sasaran utama FFA adalah menemukan cara untuk mengurangi kekuatan-

kekuatan penghambat sekaligus mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan dari kekuatan-kekuatan pendorong.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan apabila hendak menerapkan FFA adalah 1) Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat kinerja organisasi, 2) Menilai faktor pendorong dan menghambat kinerja, 3) Faktor kunci keberhasilan dan diagram FFA, 4) Perumusan Tujuan, 5) Menentukan sasaran dan kinerja, 6) Penyusunan strategi, 7) Penyusunan rencana kerja, 8) Pelaksanaan rencana kerja, dan 9) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

QSPM

QSPM dirancang untuk memprioritaskan atau menentukan daya tarik dari strategi dihasilkan dalam SWOT dan matriks IE. Organisasi tidak dapat menerapkan semua strategi yang dihasilkan dalam SWOT dan IE, sehingga QSPM yang dibutuhkan dan digunakan untuk mempersempit sejumlah strategi turun dengan menentukan daya tarik relatif dari masing-masing.

Langkah-langkah yang diperlukan dalam menyusun QSPM (Iskandarini, 2004) adalah:

- 1) Membuat daftar faktor eksternal (kesempatan/ancaman) dan faktor internal (kekuatan/kelemahan)
- 2) Memberi bobot untuk setiap faktor eksternal dan internal,
- 3) Menganalisis matriks dengan mengidentifikasi strategi alternatif yang harus diimplementasikan,
- 4) Memberikan skor alternatif dengan rentang skor 1 sampai dengan 4.
Skor 1 = tidak memiliki daya tarik,
Skor 2 = daya tariknya rendah,
Skor 3 = daya tariknya sedang,
Skor 4 = daya tariknya tinggi,
- 5) Mengalikan bobot dengan skor alternatif pada masing-masing faktor eksternal/internal pada setiap strategi,
- 6) Menjumlahkan seluruh skor alternatif.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengusulkan Perbaikan Sistem Informasi Manajemen Aset Bergerak di Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dengan menggunakan SWOT dan QSPM. Dengan didukung RCA, FFA dan rencana usulan berbentuk DFD.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten sanggau untuk 1) mengelola sistem informasi di kabupaten Sanggau berbasis komputer, 2)Mempercepat prosedur pengusulan pembelian dan penghapusan aset bergerak daerah, 3) Meningkatkan efisiensi biaya dan waktu dalam mengusulkan pembelian dan penghapusan aset bergerak daerah, 4) Meningkatkan pelayanan dan akses informasi kepada masyarakat di kabupaten Sanggau.

3. METODOLOGI PENELITIAN

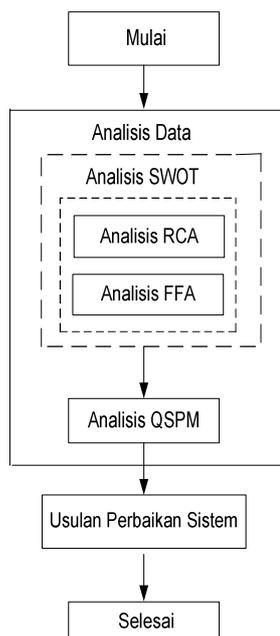
Pada metodologi penelitian, akan dijelaskan terkait dengan rancangan penelitian dan langkah-langkah penelitian.

1. Rancangan Penelitian.

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan usulan perbaikan sistem manajerial pendukung keputusan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Langkah-langkah penelitian.

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini tampak pada gambar sebagai berikut.



4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis RCA

Kelemahan-kelemahan yang diperoleh dari hasil analisis SWOT dicari akar permasalahannya dengan menggunakan *root cause analysis* (RCA). Pertanyaan yang diajukan dalam RCA adalah:

1. Mengapa pembangunan di kabupaten sanggau lamba?
2. Mengapa wilayah yang luas dan kebutuhan masing-masing wilayah menjadi penghambat?
3. Mengapa sarana dan prasarana yang belum merata menjadi penghambat?
4. Mengapa terjadi ketimpangan?
5. Mengapa banyak aset yang ada di kota kabupaten?

Jawaban atas pertanyaan yang diajukan adalah:

1. Kabupaten Sanggau memiliki wilayah yang luas dan kebutuhan masing-masing wilayah berbeda.
2. Sarana dan prasarana belum merata.
3. Ketimpangan pembangunan.
4. Banyak aset yang berada di kota kabupaten.
5. Sistem informasi aset belum tertata dengan baik.

Analisis FFA

Hasil analisis FFA tampak pada tabel berikut ini.

Faktor		NU	BF %	ND	NBD	Jml Skor Swot	NRK	NBK	TNB	FKK
Pendorong										
Keku- atan	Peralatan yang dimiliki oleh kabupaten sanggau untuk pembangunan infrastruktur lengkap.	3	0.14	5	0.71	48	2.8	0.4	1.12	2
	Pemerintah didukung oleh masyarakat.	4	0.19	5	0.95	49	2.9	0.55	1.5	1
	Personalia kompak	3	0.14	5	0.71	48	2.8	0.4	1.12	
	Memiliki kewenangan mengelola keuangan daerah.	2	0.1	2	0.19	35	2.1	0.2	0.39	
Total							11			
Pe- luang										
Pe- luang	Kabupaten Sanggau banyak dilirik oleh investor	1			0	48	2.8	0.13	0.18	
	DPPKAD mendapatkan DAK dan dana perimbangan pemerintah pusat	2	0.05	1	0.05	39	2.3	0.22	0.41	2
	Adanya program pembangunan berbasis kampung dari pemerintah pusat	1	0.1	2	0.19	45	2.6	0.13	0.17	
	Perkembangan teknologi informasi	3	0.05	1	0.05	59	3.5	0.5	0.92	1
	Hibah dari pemerintah pusat atau pihak ketiga.	2	0.14	3	0.43	39	2.3	0.22	0.41	
Total		21					13,5			
Penghambat										
Kele- mahan	Jalur pengajuan dan laporan panjang dan manual.	2	0.1	2	0.19	59	3.5	0.33	0.52	
	Tidak dapat melihat posisi aset pada instansi lain secara cepat	2	0.1	5	0.48	59	3.5	0.33	0.81	2

Faktor		NU	BF %	ND	NBD	Jml Skor Swot	NRK	NBK	TNB	FKK
	Sarana dan prasarana masih belum merata sampai ke desa-desa	2	0.1	2	0.19	47	2.8	0.26	0.45	
	Aset bergerak tidak di simpan di kantor masing-masing karena ada yang di bawa pulang	4	0.19	3	0.57	59	3.5	0.66	1.23	1
	Koordinasi tidak baik antar masing-masing instansi yang memiliki aset bergerak dan penguasaan pengurusan tentang aset bergerak masih 2kurang.	2	0.1	2	0.19	63	3.7	0.35	0.54	
							17			
Ancaman	Kebijakan pemerintah (pusat) yang berubah-ubah	4	0.19	1	0.19	36	2.1	0.4	0.59	2
	Kurang adanya koordinasi antar departemen/dinas	2	0.1	2	0.19	68	4	0.38	0.57	
	Adanya investor dari luar yang cenderung tidak memihak pada masyarakat	2	0.1	1	0.1	41	2.4	0.23	0.32	
	Munculnya perusahaan-perusahaan swasta yang menyewakan kendaraan yang memungkinkan pendapatan asli daerah berkurang	3	0.14	3	0.43	43	2.5	0.36	0.79	1
Total		23					11			

Berdasarkan tabel di atas dan berdasarkan kriteria pemilihan faktor kunci, maka diperoleh empat faktor kunci. Faktor kunci yang berasal dari kekuatan adalah 1) pemerintah didukung oleh masyarakat, 2) peralatan yang dimiliki oleh Kabupaten Sanggau untuk pembangunan infrastruktur lengkap. Faktor kunci yang berasal dari kelemahan adalah 1) aset bergerak tidak disimpan di kantor masing-masing karena ada yang dibawa pulang, 2) tidak dapat melihat posisi aset pada instansi lain secara cepat. Faktor kunci yang berasal dari kesempatan adalah 1) hibah dari pemerintah pusat atau pihak ketiga, 2) adanya program pembangunan berbasis kampung dari pemerintah pusat. Faktor kunci yang berasal dari ancaman adalah 1) munculnya perusahaan-perusahaan swasta yang menyewakan kendaraan yang memungkinkan pendapatan asli daerah berkurang, 2) kebijakan pemerintah (pusat) yang berubah-ubah.

Analisis SWOT

Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ditemukan pada DPPKAD dimasukkan pada matriks SWOT. Tujuan matriks ini adalah untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang dan secara bersama-sama meminimalkan kelemahan dan ancaman. Dengan kata lain, matriks SWOT bertujuan untuk menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal dihadapi dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh DPPKAD.

Strength (S)

Ada empat kekuatan yang diidentifikasi DPPKAD. Kekuatan tersebut adalah 1) Peralatan yang dimiliki oleh kabupaten sanggau untuk pembangunan infrastruktur lengkap, 2) Pemerintah didukung oleh masyarakat, 3) Personalia kompak, 4) Memiliki kewenangan mengelola keuangan daerah.

Weakness (W)

Kelemahan yang dimiliki oleh DPPKAD ada enam, yaitu: 1) Jalur pengajuan dan laporan panjang dan manual, 2) Sumber daya manusia masih rendah, 3) Tidak dapat melihat posisi aset pada instansi lain secara cepat, 4) Sarana dan prasarana masih belum merata sampai ke desa-desa, 5) Aset bergerak tidak di simpan di kantor masing-masing karena ada yang di bawa pulang, 6) Koordinasi tidak baik antar masing-masing instansi yang memiliki aset bergerak dan penguasaan pengurusan tentang aset bergerak masih kurang.

Opportunities (O)

Peluang DPPKAD teridentifikasi ada 5 buah, yaitu: 1) Kabupaten Sanggau banyak dilirik oleh investor, 2) DPPKAD mendapatkan DAK dan dana perimbangan pemerintah pusat, 3) Adanya program pembangunan berbasis kampung dari pemerintah pusat, 4) Perkembangan teknologi informasi, 5) Hibah dari pemerintah pusat atau pihak ketiga.

Threats (T)

Ancaman DPPKAD ada empat, yaitu: 1) Kebijakan pemerintah (pusat) yang berubah-ubah, 2) Kurang adanya koordinasi antar departemen/dinas, 3) Kebijakan pemerintah (pusat) yang berubah-ubah, dan 4) Kurang adanya koordinasi antar departemen/dinas.

Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka dapat diketahui strategi-strategi di masing-masing kuadran yang dapat dilaksanakan oleh DPPKAD. Strategi SO (Kuadran I) yaitu: 1) Mempromosikan potensi Kabupaten Sanggau secara luas dengan memanfaatkan teknologi informasi, 2) Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan investor dalam mengelola potensi daerah melalui teknologi informasi, 3) Mengembangkan teknologi

informasi untuk mendukung kawasan pedesaan. Strategi ST (Kuadran II) yaitu: 1) Menetapkan harga sewa yang kompetitif, 2) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui teknologi informasi, 3) Meningkatkan kerjasama antar instansi dengan menggunakan teknologi informasi. Strategi WO (Kuadran III) yaitu: 1) Mensinkronkan peraturan sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, 2) Meningkatkan penggunaan teknologi informasi di berbagai unit. Sedangkan Strategi WT (Kuadran IV) yaitu: 1) Meningkatkan kualitas SDM dalam pelayanan dan penguasaan teknologi informasi, 2) Memperbaiki koordinasi secara internal secara efektif dan efisien.

QSPM

Analisis QSPM merupakan analisis kuantitatif yang digunakan untuk memilih strategi yang akan diimplementasikan berdasarkan tingkat kepentingannya. Dalam analisis QSPM ini, masing-masing strategi diberi bobot berdasarkan daya tarik kunci faktor masing-masing strategi. Masing-masing strategi diberikan bobot kemudian dikalikan skor alternatif. Nilai tertinggi diambil sebagai strategi yang akan diusulkan. Berdasarkan urutan strateginya sebagai berikut.

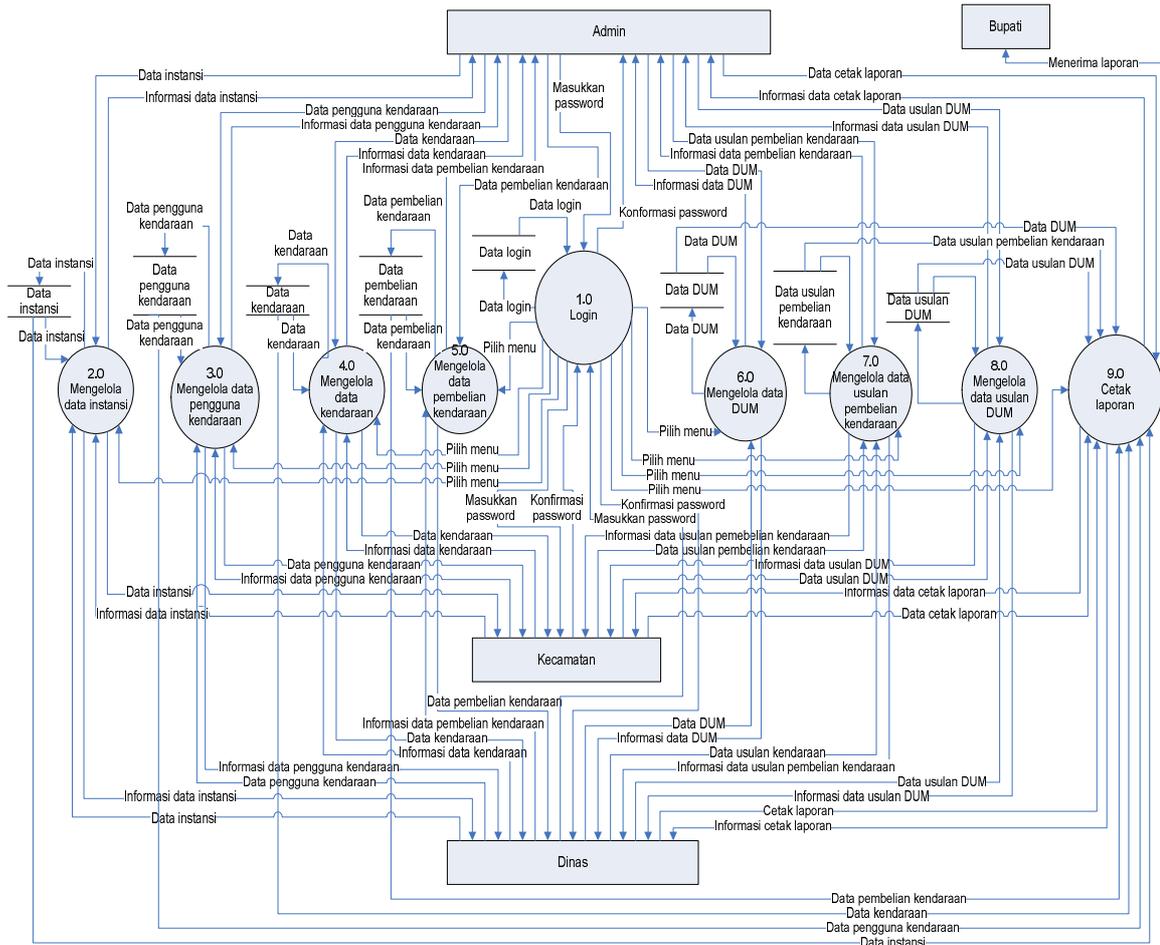
- A : Mempromosikan potensi Kabupaten Sanggau secara luas dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- B : Mengembangkan teknologi informasi untuk mendukung kawasan pedesaan.
- C : Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan investor dalam mengelola potensi daerah melalui teknologi informasi.
- D : Menetapkan harga sewa yang kompetitif.
- E : Meningkatkan kualitas pelayanan melalui teknologi informasi.
- F : Meningkatkan kerjasama antar instansi dengan menggunakan teknologi informasi.
- G : Mensinkronkan peraturan sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.
- H : Meningkatkan penggunaan teknologi informasi di berbagai unit.
- I : Meningkatkan kualitas SDM dalam pelayanan dan penguasaan teknologi informasi.
- J : Memperbaiki koordinasi internal secara efektif dan efisien.

Perhitungan dengan menggunakan matriks QSPM dilakukan atas strategi-strategi tersebut di atas. Dari hasil perhitungan matriks QSPM diperoleh urutan strategi sebagai berikut.

- F : Meningkatkan kerjasama antar instansi dengan menggunakan teknologi informasi.
- B : Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan investor dalam mengelola potensi daerah melalui teknologi informasi.
- E : Meningkatkan kualitas pelayanan melalui teknologi informasi.
- H : Meningkatkan penggunaan teknologi informasi di berbagai unit.
- G : Mensinkronkan peraturan sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.
- J : Memperbaiki koordinasi internal secara efektif dan efisien.
- I : Meningkatkan kualitas SDM dalam pelayanan dan penguasaan teknologi informasi.
- C : Mengembangkan teknologi informasi untuk mendukung kawasan pedesaan.
- A : Mempromosikan potensi Kabupaten Sanggau secara luas dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- D : Menetapkan harga sewa yang kompetitif.

Usulan DFD

Dari hasil matriks QSPM menunjukkan bahwa strategi yang dipilih adalah "**Meningkatkan kerjasama antar instansi dengan menggunakan teknologi informasi**". Dalam mengimplementasikan strategi di atas, maka perlu disusun DFD. DFD yang diusulkan tampak pada gambar berikut.



5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan evaluasi sistem yang telah disampaikan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan aset bergerak yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau di Kalimantan Barat masih sangat sulit karena sistem yang saat ini digunakan tidak spesifik dan bersifat konvensional.
2. Dengan diterapkannya sistem informasi manajemen aset pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau di Kalimantan Barat, proses inventarisasi aset bergerak menjadi lebih terstruktur dan terorganisir.
3. Sistem Informasi manajemen Aset Bergerak dapat mempermudah pengontrolan aset bergerak baik dari segi lokasi aset, kuantitas aset maupun nilainya, serta mempermudah dan mempercepat proses pencarian aset bergerak secara tepat.
4. Laporan manajemen aset bergerak dapat mendukung proses pengambilan keputusan bagi pihak *managerial* dan pihak lain yang terkait dengan manajemen aset bergerak dalam hal analisis kebutuhan aset bergerak, *procurement* aset bergerak, dan optimalisasi manfaat aset bergerak.
5. Ketersediaan aset bergerak dapat lebih terjamin, sebab kebutuhan aset bergerak lebih terkontrol dan infrastruktur bergerak yang bermasalah dapat segera dipulihkan kembali kondisinya secara cepat dan tepat .

Saran

Dari hasil analisis dan penjelasan diatas, dapat disimpulkan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam menerapkan sistem informasi manajemen aset bergerak, sebaiknya didukung oleh perangkat yang memadai, baik dari segi sumber daya manusia (*brainware*) maupun peralatannya (*hardware* dan *software*).
2. Penelitian yang dilakukan masih bersifat *independent* terhadap sistem informasi lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut agar sistem informasi manajemen aset bergerak dapat terintegrasi dengan sistem informasi lain, khususnya sistem informasi *accounting* dan sistem informasi kepegawaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrus Sholeh, 2008, Perilaku Dan Etika Pegawai Negeri: Fakta, Idealisme, Dan Tantangan Masa Depan , Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN.
- Dwiyanto Indiahono, 2009, Mengubah Netralitas Birokrasi Klasik Menjadi Netralitas Birokrasi Baru: Suatu Telaah Politik Birokrasi Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN.
- Gde Wisura, 2008, Demokratisasi Dan Problem Netralitas Birokrasi Di Indonesia , Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
- Ida Hayu Dwimawanti, 2009, Netralitas Birokrasi Dan Kualitas Pelayanan Publik Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN.
- Iskandarini, 2004 Analisis Pemecahan Masalah Dan Pengambilan Keputusan Digitized by USU digital library.
- Lili Romli, 2008, Masalah Reformasi Birokrasi, Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN.
- M.R. Khairul Muluk, 2009, Relasi Politik Dan Administrasi Dalam Kepegawaian Daerah, Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN.
- Munro, M. C., dan Wheeler, B. R., (1981). *Planning, Critical Success Factors, and Management's Information Requirement*, MIS Quarterly, Vol. 4, Iss. 4, December
- Nataniel Dengen dan Heliza Rahmania Hatta, 2009 Perancangan Sistem Informasi Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Paser vol 4 no 1 feb 2009 jurnal informatika Mulawarman.
- Pflaum, A. dan Delmont, T. 1987. External scanning: A tool for planners. Journal of the American Planning Association.
- Parasuraman, A., Zithhaml, V. A., dan Berry, L. L., (1988), *ServQual: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality*, Journal of Retailing, Vol. 64, Iss. 1, Spring: 12-40.
- Rosfiah Aarsal, 2009, Reformasi Birokrasi Melalui Penerapan Manajemen Kontrak Sebagai Upaya Mewujudkan Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Era Otonomi Daerah Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN.
- Rangkuti, Freddy. (2008). Analisis SWOT Teknik membedah kasus bisnis : Reorientasi konsep perencanaan strategis untuk menghadapi abad 21. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rooney & Vanden Heuvel, 2004, Quality Basics: Root Cause Analysis for Beginners,
- Rainer, R. K. Jr., dan Watson, H. J., (1995), *The Key to Executive Information System Success*, Journal of Management Information System, Vol. 12, No. 2, Fall: 83-98.
- Syafuan Rozi, 2009, Netralitas Korporat Dan Birokrasi Inovatif Di Indonesia: Menanam, Merawat Dan Menuai Kemuliaan Bangsa Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN.